



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan oleh:

P.1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

P.2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 3 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang imam masjid bernama xxx karena orangtua Pemohon II tinggal berjauhan dengan Pemohon II sehingga orangtua Pemohon II

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakiliikan melalui telpon kepada Xxx tersebut, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xx dan Xx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama xx, umur 3 tahun;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Midai, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal xx di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa 14 hari sebelum hari sidang telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna melalui media massa berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/DS-BB/2017/059 tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/DS-BB/2017/060 tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Belanak, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga menyampaikan alat bukti saksi berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami suami, tetapi saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xx di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Xx yang berwakil wali kepada Abdullah melalui telpon, Saksi tidak bisa hadir karena berada di Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka beragama Islam dan Pemohon II berstatus perawan beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II, dan kenal Pemohon I sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami suami, Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xx di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syari'at Islam yaitu ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xx yang berwakil wali kepada Abdullah melalui telpon, ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena berada di Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Xx dan Xx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama guna menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna belum tercatat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah, padahal kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xx di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon suami yakni Pemohon II, adanya wali nikah yaitu Xx yang berwakil wali kepada imam masjid bernama xx, adanya ijab kabul, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama Xx dan Xx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang isinya menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama bernama Xx sebagai ayah kandung Pemohon II memberikan keterangan bahwa dirinya telah menjadi wali nikah Pemohon II dengan berwakil wali kepada imam masjid bernama Abdullah melalui telpon, Saksi Xx tidak bisa hadir di akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena bertempat tinggal berjauhan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa secara materil saksi kedua bernama Mayasari telah memberikan keterangan bahwa hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal xx dengan dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, ayah Pemohon I bernama Xx sebagai wali nikah yang berwakil wali kepada xx, disaksikan oleh Xx dan Xx sebagai saksi nikah, diucapkan akad

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ijab kabul, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sewaktu akan menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak beragama Islam sedangkan Pemohon II berstatus gadis beragama Islam serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah;
- c. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat, namun kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai suami seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami suami selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal xx di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Natuna di Kecamatan Midai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya pengumuman | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 286.000,- |

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);